

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kejaksaan Tinggi Riau adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansipengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Tinggi Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pekanbaru, 23 Mei 2023

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU**



**Dr. SUPARDI**

Jaksa Utama Madya NIP. 19710428 199503 1 001



## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun Anggaran Kejaksaan Tinggi Riau ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.119.486.842 berupa Pendapatan Pajak sebesar Rp.0, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.119.486.842 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp.0 atau mencapai 885,09 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.13.500.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.53.217.121.304 atau mencapai 98,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.53.996.800.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.401.716.091.421 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.401.699.567.070 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.16.524.351.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.747.116.180 dan Rp.399.968.975.241.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.193.035.663 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.66.573.667.648 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.-66.380.631.985, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.580 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.- 66.380.631.405.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp.405.511.219.187, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.-66.380.631.405 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -283.385.631 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 61.121.773.090 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.399.968.975.241.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



**KEJAKSAAN TINGGI RIAU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

URAIAN	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>					
Penerimaan Perpajakan	B.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	13.500.000	119.486.842	885,09	252.912.740
Penerimaan Hibah	B.3	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13.500.000</b>	<b>119.486.842</b>	<b>885,09</b>	<b>252.912.740</b>
<b>BELANJA</b>	B.4				
Belanja Pegawai	B.5	43.228.701.000	43.227.104.138	100,00	37.959.657.635
Belanja Barang	B.6	10.226.099.000	9.451.763.341	92,43	6.849.824.569
Belanja Modal	B.7	542.000.000	538.253.825	99,31	185.216.300
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.8	-	-	-	-
Belanja Subsidi	B.9	-	-	-	-
Belanja Hibah	B.10	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.11	-	-	-	-
Belanja Lain-Lain	B.12	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>53.996.800.000</b>	<b>53.217.121.304</b>	<b>98,56</b>	<b>44.994.698.504</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(53.983.300.000)</b>	<b>(53.097.634.462)</b>		<b>(44.741.785.764)</b>



**KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Perpajakan	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rug	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.9	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.15	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.16	247.152.823.000	247.152.823.000
Peralatan dan Mesin	C.17	80.881.060.847	75.253.284.006
Gedung dan Bangunan	C.18	134.810.135.020	131.712.511.981
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.19	3.655.090.779	3.655.090.779
Aset Tetap Lainnya	C.20	151.891.500	151.891.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(64.951.434.076)	(50.920.010.649)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>401.699.567.070</b>	<b>407.005.590.617</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.23	50.875.000	50.875.000
Aset Lain-lain	C.24	3.153.949.570	2.959.207.183
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(3.188.300.219)	(2.979.718.148)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>16.524.351</b>	<b>30.364.035</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>401.716.091.421</b>	<b>407.035.954.652</b>



<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	1.678.233.647	1.524.735.465
Hibah Yang Belum Disahkan	C.28	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.29	68.882.533	-
Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar	C.30	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.747.116.180</b>	<b>1.524.735.465</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.747.116.180</b>	<b>1.524.735.465</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.31	399.968.975.241	405.511.219.187
<b>JUMLAH EKUTAS</b>		<b>399.968.975.241</b>	<b>405.511.219.187</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>401.716.091.421</b>	<b>407.035.954.652</b>



KEJAKSAAN TINGGI RIAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	193.035.663	232.871.955
Pendapatan Hibah	D.3	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>193.035.663</b>	<b>232.871.955</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.4	43.526.651.977	38.145.905.193
Beban Persediaan	D.5	122.864.908	777.670.584
Beban Barang dan Jasa	D.6	7.666.104.553	5.868.145.913
Beban Pemeliharaan	D.7	872.615.376	633.155.256
Beban Perjalanan Dinas	D.8	644.128.847	292.902.473
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.9	-	-
Beban Bunga	D.10	-	-
Beban Subsidi	D.11	-	-
Beban Hibah	D.12	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.13	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.14	13.741.301.987	15.199.908.742
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.15	-	-
Beban Lain-lain	D.16	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>66.573.667.648</b>	<b>60.917.688.161</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(66.380.631.985)</b>	<b>(60.684.816.206)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.17	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.18	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.19	580	20.040.785
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>580</b>	<b>20.040.785</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(66.380.631.405)</b>	<b>(60.664.775.421)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.20		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(66.380.631.405)</b>	<b>(60.664.775.421)</b>



### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas  
dan Rencana Strategis*

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menggantikan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Tinggi Riau dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang dibantu oleh 7 (tujuh) Asisten yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Militer, Asisten Pidana Khusus, Asisten Perdata dan TUN, Asisten Pengawasan dan 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha serta membawahi 12 (dua belas) Satker Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Dumai, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Kejaksaan Negeri Siak, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Kejaksaan Negeri Pelalawan.

UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi poros sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, karena Kejaksaan berada pada posisi poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan Pengadilan. Kejaksaan juga merupakan instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Strategi peningkatan kinerja Kejaksaan tentunya tidak dapat dipisahkan dari situasi, kondisi dan tuntutan aspirasi demokrasi yang menghendaki "Hukum Sebagai Panglima". Hal ini wajar adanya, karena seiring dengan maraknya tuntutan masyarakat untuk menciptakan komunitas masyarakat Madani (Civil Society) memerlukan adanya peningkatan pelayanan hukum dan penegakan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum itu juga harus berorientasi kepada kualitas substantif, yang terukur dan transparan. Salah satu strategi itu dapat terwujud dengan pengelolaan anggaran secara tertib dan transparan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Kejaksaan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi, untuk proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran, untuk proses pelaksanaan diperankan oleh modul Komitmen, modul Pembayaran, modul Bendahara, modul Aset Tetap dan modul Persediaan serta untuk proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

## A.3 BASIS AKUNTANSI

Kejaksaan Tinggi Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA yang merupakan entitas pelaporan dari Kejaksaan Tinggi Riau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



## (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

## (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

##### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan



- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggalpelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Pajak	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.500.000	13.500.000
Penerimaan Hibah	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	40.899.556.000	43.228.701.000
Belanja Barang	9.575.198.000	10.226.099.000
Belanja Modal	42.000.000	542.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>50.516.754.000</b>	<b>53.996.800.000</b>

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp119.486.842 atau mencapai 885,09 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp13.500.000. Pendapatan Kejaksaan Tinggi Riau terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp119.486.842 dan Penerimaan Hibah sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% terhadap anggaran
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.500.000	119.486.842	885,09
Penerimaan Hibah	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.500.000</b>	<b>119.486.842</b>	<b>885,09</b>

Realisasi Penerimaan Pajak TA 2022 bila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar 0,00 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 52,76 persen, dan Penerimaan Hibah sebesar 0,00 persen. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:



Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Penerimaan Pajak	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	119.486.842	252.912.740	(133.425.898)	(52,76)
Penerimaan Hibah	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>119.486.842</b>	<b>252.912.740</b>	<b>-133.425.898</b>	<b>(52,76)</b>

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2022 sebesar 0,00 dari TA 2021. Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp119.486.842

### B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp119.486.842 dan Rp252.912.740. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar 52,76 dari TA 2021 karena tidak terdapat pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dibanding tahun sebelumnya Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
PNBP LAINNYA	119.486.842	252.912.740	(133.425.898)	(52,76)
<b>Jumlah</b>	<b>119.486.842</b>	<b>252.912.740</b>	<b>(133.425.898)</b>	<b>(52,76)</b>

Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Anggaran lain-lain	-	14.902	(14.902)	(100,00)
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	-	-
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	117.500.758	96.357.053	21.143.705	21,94
Pendapatan ongkos perkara	-	-	-	-
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	-	136.500.000	(136.500.000)	(100,00)
Pendapatan Denda hasil tindak pidana lainnya	-	-	-	-



Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Pemerintah	1.985.504	-	1.985.504	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	580	1.106	(526)	(47,56)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	20.039.679	(20.039.679)	(100,00)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>119.486.842</b>	<b>252.912.740</b>	<b>(133.425.898)</b>	<b>(52,76)</b>

Realisasi Penerimaan Hibah Rp0

### B.1.3 Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Hibah TA 2022 sebesar 0,00 dari TA 2021 karena adanya program pemerintah. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Hibah Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Realisasi Belanja Rp53.217.121.304

### B.2 Belanja

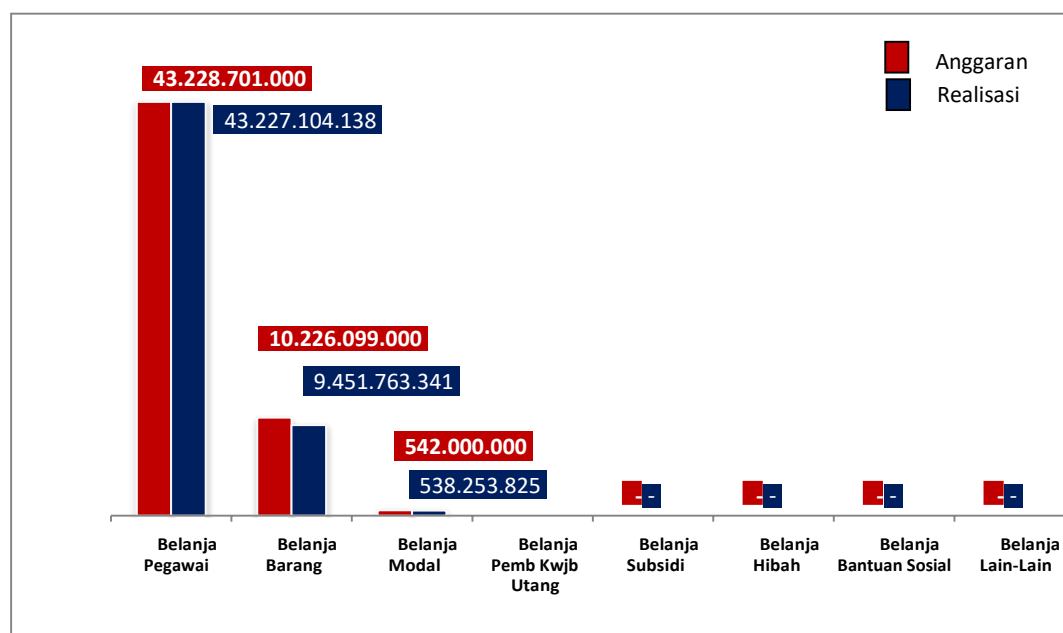
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp53.217.121.304 atau 98,56 % dari anggaran belanja sebesar Rp.53.996.800.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	43.228.701.000	43.227.104.138	100,00
Belanja Barang	10.226.099.000	9.451.763.341	92,43
Belanja Modal	542.000.000	538.253.825	99,31
<b>Jumlah</b>	<b>53.996.800.000</b>	<b>53.217.121.304</b>	<b>98,56</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022*



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 18,27%. Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

Sudah lebih optimal penyerapan kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dari tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Pegawai	43.227.104.138	37.959.657.635	5.267.446.503	13,88
Belanja Barang	9.451.763.341	6.849.824.569	2.601.938.772	37,99
Belanja Modal	538.253.825	185.216.300	353.037.525	190,61
<b>Jumlah</b>	<b>53.217.121.304</b>	<b>44.994.698.504</b>	<b>8.222.422.800</b>	<b>18,27</b>

*Realisasi Belanja Pegawai  
Rp43.227.104.138*

### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp43.227.104.138 dan Rp37.959.657.635. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,88 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai, kenaikan grade tunjangan kinerja pegawai dan kenaikan tunjangan jabatan pegawai.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	11.173.225.940	10.117.587.920	1.055.638.020	10,43
Belanja Pembulatan Gaji PNS	169.018	151.753	17.265	11,38
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	779.767.318	743.207.628	36.559.690	4,92
Belanja Tunj. Anak PNS	244.336.364	229.261.604	15.074.760	6,58
Belanja Tunj. Struktural PNS	143.042.720	190.300.000	(47.257.280)	(24,83)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.843.780.000	7.883.796.000	959.984.000	12,18
Belanja Tunj. PPh PNS	626.627.864	615.021.392	11.606.472	1,89
Belanja Tunj. Beras PNS	608.183.160	573.131.880	35.051.280	6,12
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	6.000.000	6.000.000	-	-
Belanja Uang Makan PNS	1.860.977.970	1.793.965.000	67.012.970	3,74
Belanja Tunjangan Umum PNS	195.250.000	167.120.000	28.130.000	16,83
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18.747.186.753	15.706.163.254	3.041.023.499	19,36
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>43.228.547.107</b>	<b>38.025.706.431</b>	<b>5.202.840.676</b>	<b>13,68</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	1.442.969	66.048.796	(64.605.827)	(98)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>43.227.104.138</b>	<b>37.959.657.635</b>	<b>5.267.446.503</b>	<b>13,88</b>

*Realisasi Belanja Barang  
Rp9.451.763.341*

### B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp9.451.763.341 dan Rp6.849.824.569. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 37,99 % dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh maksimalnya penyerapan kebutuhan belanja barang terutama pada kegiatan pendukung teknis.



Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Barang Operasional	3.001.853.226	3.121.234.525	(119.381.299)	(3,82)
Belanja Barang Non Operasional	2.399.517.971	560.578.133	1.838.939.838	328,04
Belanja Barang Persediaan Barang	153.297.798	101.671.185	51.626.613	50,78
Belanja Jasa	2.410.783.013	2.040.283.598	370.499.415	18,16
Belanja Pemeliharaan	842.182.486	733.154.655	109.027.831	14,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	644.128.847	292.902.473	351.226.374	119,91
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.451.763.341</b>	<b>6.849.824.569</b>	<b>2.601.938.772</b>	<b>37,99</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.451.763.341</b>	<b>6.849.824.569</b>	<b>2.601.938.772</b>	<b>37,99</b>

**Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :**

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp45.466.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp43.826.200 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.826.200	26.311.138	17.515.062	60,04
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>43.826.200</b>	<b>26.311.138</b>	<b>17.515.062</b>	<b>60,04</b>

Realisasi Belanja Modal Rp538.253.825

**B.5. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp538.253.825 dan Rp185.216.300. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 190,61 % dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh karena adanya alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari anggaran PNBPNP.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	538.253.825	185.216.300	353.037.525	190,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>538.253.825</b>	<b>185.216.300</b>	<b>353.037.525</b>	<b>190,61</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>538.253.825</b>	<b>185.216.300</b>	<b>353.037.525</b>	<b>190,61</b>



### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal tanah.

*Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp538.253.825, mengalami kenaikan sebesar 190,61 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu Rp185.216.300. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan fasilitas perkantoran untuk administrasi tilang dan fasilitas untuk disabilitas.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	538.253.825	185.216.300	353.037.525	190,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>538.253.825</b>	<b>185.216.300</b>	<b>353.037.525</b>	<b>190,61</b>
Pengembalian	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>538.253.825</b>	<b>185.216.300</b>	<b>353.037.525</b>	<b>190,61</b>

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>



### B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.4 Piutang Perpajakan

Saldo Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut :

*Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang PPh Pasal 21	-	-
Piutang PPh Pasal 22	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Piutang Subsidi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

Keterangan	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
a	-	-
b	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

No.	Nama	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
a		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan bukan pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,01	-
Kurang Lancar	-	0,50	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	1,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>			<b>-</b>

### C.9 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.10 Uang Muka Belanja (prepayment)

Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa&. Uang Muka Belanja (prepayment) . Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya. Pendapatan yang Masih Harus Diterima tersebut berupa pendapatan jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.12 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik.

### C.13 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



#### C.14 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan  
(Audited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
<b>Jumlah</b>	-	-

#### C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2022  
dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

#### C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp247.152.823.000 dan Rp247.152.823.000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>247.152.823.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
Pengembangan Nilai Aset	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Koreksi Kesalahan input IP	-
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>247.152.823.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) September TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	34.770	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	67.978.710.000
2	39.737	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	177.596.113.000
3	789	TANAH UNTUK TAMAN	1.578.000.000
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>247.152.823.000</b>



**C.17 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp80.881.060.847 dan Rp75.253.284.006. Nilai Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	75.253.284.006
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	538.253.825
Transfer Masuk	4.160.839.395
Hibah (Masuk)	2.851.880.818
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	6.890.625
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	1.728.454.810
Reklasifikasi Keluar	6.890.625
Koreksi Pencatatan	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	194.742.387
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>80.881.060.847</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(52.573.289.360)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>28.307.771.487</b>

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin berupa Penambahan kuantitas sebanyak 149 unit dengan nilai 7,557,864,663 dan Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin berupa Pengurangan kuantitas sebanyak 246 unit dengan nilai 1,930,087,822 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.18 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp134.810.135.020 dan Rp131.712.511.981. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	131.712.511.981
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Hibah (Masuk)	3.097.623.039
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.819.073.924
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan	2.819.073.924
Transfer Keluar	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>134.810.135.020</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(11.098.862.943)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>123.711.272.077</b>

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Penambahan kuantitas sebanyak 2 unit dengan nilai 5,916,696,963 dan Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa Pengurangan kuantitas sebanyak 1 unit dengan nilai 2,819,073,924 Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.



### C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.655.090.779 dan Rp3.655.090.779. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	3.655.090.779
<b>Mutasi tambah:</b>	
Hibah (Masuk)	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Kesalahan input IP	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>3.655.090.779</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.279.281.773)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>2.375.809.006</b>

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

Tidak ada Penambahan kuantitas

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

Tidak ada Pengurangan kuantitas

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp151.891.500

### C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.151.891.500 dan Rp.151.891.500. Aset tetap tersebut berupa aset tetap Mografi, bahan Kartografi dan Lukisan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	151.891.500
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>151.891.500</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>151.891.500</b>

Rincian aset tetap Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0

### C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset  
Tetap Rp64.951.434.076

### C. 22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp64.951.434.076 dan Rp50.920.010.649. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2022*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	80.881.060.847	(52.573.289.360)	28.307.771.487
2	Gedung dan Bangunan	134.810.135.020	(11.098.862.943)	123.711.272.077
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.655.090.779	(1.279.281.773)	2.375.809.006
4	Aset Tetap Lainnya	151.891.500	-	151.891.500
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>219.498.178.146</b>	<b>(64.951.434.076)</b>	<b>154.546.744.070</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan



### C. 23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp50.875.000 dan Rp50.875.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kejaksaan Tinggi Riau berupa Software Komputer.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2022</b>	<b>50.875.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2022</b>	<b>50.875.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(38.156.250)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>12.718.750</b>

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :  
Tidak ada Penambahan/Pengurangan kuantitas

### C. 24 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3.153.949.570 dan Rp2.959.207.183. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<b>2.959.207.183</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	194.742.387
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen)	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>3.153.949.570</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(3.150.143.969)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>3.805.601</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

### C. 25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3.188.300.219 dan Rp2.979.718.148. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Lain-lain	3.153.949.570	(3.150.143.969)	12.718.750
Aset Tak Berwujud	50.875.000	(38.156.250)	3.805.601
<b>Jumlah</b>	<b>3.204.824.570</b>	<b>(3.188.300.219)</b>	<b>16.524.351</b>
<b>Total</b>	<b>3.204.824.570</b>	<b>(3.188.300.219)</b>	<b>16.524.351</b>



Uang Muka dari KPPN Rp0

### C. 26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp1.678.233.647

### C. 27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.678.233.647 dan Rp1.524.735.465. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.678.233.647
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-
<b>Total</b>	<b>1.678.233.647</b>

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Hibah Yang Belum Disahkan  
Rp0

### C. 28 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Keseluruhan Hibah Yang Belum Disahkan tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
0	-
-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

Pendapatan Diterima Dimuka  
Rp68.882.533

### C. 29 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp68.882.533 dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah diterima dan disetor ke rekening kas umum negara namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak, Pendapatan diterima dimuka berupa biaya sewa kantin, ATM BNI, ATM BRI dan sewa VideoTron (bukti sewa terlampir) dengan total sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	68.882.533
<b>Total</b>	<b>68.882.533</b>

Ekuitas Rp399.968.975.241

### C. 30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp399.968.975.241. dan Rp405.511.219.187. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp193.035.663

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp193.035.663 dan Rp232.871.955. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	191.050.159	96.357.053	98,27
Pendapatan ongkos perkara	-	-	-
Pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan yang telah	-	-	-
Pendapatan Denda pelanggaran lalu lintas	-	-	-
Pendapatan Denda hasil tindak pidana lainnya	-	-	-
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ ditetapkan	-	136.500.000	(100,00)
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan	-	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana lainnya yang telah diputuskan/ ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Pemerintah	1.985.504	-	-
Pendapatan Sitaan/Rampasan	-	-	-
Pendapatan Anggaran lain-lain	-	14.902	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>193.035.663</b>	<b>232.871.955</b>	<b>(17,11)</b>



**D.3 Pendapatan Hibah**

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Hibah Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	-	-
Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D.4 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.526.651.977 dan Rp38.145.905.193.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,11 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh bertambahnya pegawai dan adanya beban pegawai yang belum dibayar. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	11.173.225.940	10.091.452.736	10,72
Beban Pembulatan Gaji PNS	166.049	151.141	9,86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	779.767.318	743.207.628	4,92
Beban Tunj. Anak PNS	244.336.364	229.261.604	6,58
Beban Tunj. Struktural PNS	141.602.720	190.300.000	(25,59)
Beban Tunj. Fungsional PN	8.843.780.000	7.883.796.000	12,18
Beban Tunj. PPh PNS	626.627.864	615.021.392	1,89
Beban Tunj. Beras PNS	608.183.160	573.131.880	6,12
Beban Tunj. Kompensasi K	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	1.997.192.970	1.824.372.000	9,47
Beban Tunjangan Umum P	195.250.000	167.120.000	16,83
Beban Tunj. Kompensasi K	6.000.000	6.000.000	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	18.910.519.592	15.822.090.812	19,52
<b>Jumlah</b>	<b>43.526.651.977</b>	<b>38.145.905.193</b>	<b>14,11</b>

**D.5 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp122.864.908 dan Rp777.670.584



Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 84,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh kurangnya kegiatan yang dilaksanakan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)
Beban Persediaan konsumsi	122.864.908	777.670.584	(84,20)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>122.864.908</b>	<b>777.670.584</b>	<b>(84,20)</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp7.666.104.553*

#### D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.666.104.553 dan Rp5.868.145.913.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 30,64 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan pada beban barang operasional, beban non operasional, langganan daya dan jasa, sewa, jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.453.196.111	2.597.824.072	(5,57)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	308.180.000	342.030.000	(9,90)
Beban Barang Operasional Lainnya	143.785.315	155.069.315	(7,28)
Beban Bahan	740.805.069	436.433.039	69,74
Beban Honor Output Kegiatan	-	8.250.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.658.712.902	115.895.094	1.331,22
Beban Langganan Listrik	1.816.895.651	1.812.195.628	0,26
Beban Langganan Telepon	290.712.785	282.424.727	2,93
Beban Jasa Pos dan Giro	29.713.000	57.666.500	(48,47)
Beban Sewa	97.211.920	30.046.400	223,54
Beban Jasa Profesi	30.200.000	4.000.000	655,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.666.104.553</b>	<b>5.868.145.913</b>	<b>30,64</b>



#### D.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp872.615.376 dan Rp633.155.256.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 37,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh karena besarnya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169.596.692	261.264.519	(35,09)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	672.585.794	371.890.737	80,86
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>872.615.376</b>	<b>633.155.256</b>	<b>37,82</b>

#### D.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp644.128.847 dan Rp292.902.473

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 119,91 persen disebabkan oleh adanya pembahasan program dan dikarenakan sudah dilakukan kembali kegiatan secara tatap muka. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	488.174.725	253.952.473	92,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.550.000	38.150.000	79,69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	87.404.122	800.000	10.825,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>644.128.847</b>	<b>292.902.473</b>	<b>119,91</b>

#### D.9 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :



Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Bunga Rp0

**D.10 Beban Bunga**

Beban Bunga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Bunga merupakan beban yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga atas pembayaran biaya/kewajiban pemerintah.

Beban Subsidi Rp0

**D.11 Beban Subsidi**

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Subsidi merupakan beban subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah .

Beban Hibah Rp0

**D.12 Beban Hibah**

Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Rp0

**D.13 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



#### D.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.741.301.987 dan Rp15.199.908.742.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.472.111.467	11.513.396.670	(9,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.889.841.758	2.830.674.786	2,09
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.120.934	1.120.934	-
Beban Penyusutan Irigasi	365.509.078	365.509.078	-
Beban Amortisasi Software	12.718.750	489.207.274	(97,40)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>13.741.301.987</b>	<b>15.199.908.742</b>	<b>(9,60)</b>
Beban Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>13.741.301.987</b>	<b>15.199.908.742</b>	<b>(9,60)</b>

#### D.15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.16 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

#### D.17 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Surplus (Defisit)  
Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang Rp0

#### D.18 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan  
(Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non Operasional  
Lainnya Rp580

#### D.19 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp580 dan Rp20.040.785.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan  
2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	580	1.106	(104,88)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	20.039.679	-
<b>Jumlah</b>	<b>580</b>	<b>20.040.785</b>	<b>(100,00)</b>

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.20 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.21 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.826.200	26.311.138	17.515.062	60,04
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>43.826.200</b>	<b>26.311.138</b>	<b>17.515.062</b>	<b>60,04</b>

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Merupakan belanja obat-obatan/ kegiatan swab terkait penanganan pandemi Covid-19



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp405.511.219.187,00

### E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.405.511.219.187,00 dan Rp.421.877.009.895,00

*Defisit LO Rp.-*  
66.380.631.405,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-66.380.631.405,00 dan Rp.-60.664.775.421,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif*  
*Perubahan Kebijakan*  
*Akuntansi/Kesalahan*  
*Mendasar Rp.0,00*

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Penyesuaian Nilai Aset*  
Rp.0,00

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan*  
Rp0,00

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih Revaluasi Aset Tetap*  
Rp.0,00

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari KPKNL setempat.

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2022*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Tanah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Aset Tetap Non*  
*Revaluasi Rp-140.953.697*

#### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-140.953.697 dan Rp.0. Koreksi ini berupa koreksi pencatatan (nilai bertambah/berkurang) dan dari hasil nilai penyusutan aset tetap.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(140.953.697)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>(140.953.697)</b>



### E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-142.431.934 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah koreksi beban perjalanan dinas .Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

*Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(142.431.934)
<b>Jumlah</b>	<b>(142.431.934)</b>

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.61.121.773.090 dan Rp.44.298.984.713. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

*Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	53.217.121.304
Diterima dari Entitas Lain	(119.486.842)
Transfer Masuk	3.400.324.863
Transfer Keluar	(1.325.690.092)
Pengesahan Hibah Langsung	5.949.503.857
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
<b>Jumlah</b>	<b>61.121.773.090</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar -119.486.842, sedangkan DKEL sebesar 53.217.121.304

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.400.324.863 terdiri dari:

*Rincian Transfer Masuk Tahun 2022*

Jenis Akun	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	4.160.839.395
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN AGUNG R.I.	(760.514.532)
<b>Jumlah</b>		<b>3.400.324.863</b>



Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp-1.325.690.092 yang terdiri dari:

*Rincian Transfer Keluar Tahun 2022*

Jenis Akun	Entitas Tujuan	Nilai
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU	215.363.720
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU	(49.352.932)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	(25.118.500)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU	212.497.030
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU	(50.821.262)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR	151.463.310
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR	(35.562.830)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR	(25.118.500)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI DUMAI	170.483.720
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI DUMAI	(40.376.932)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI	(25.118.500)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU	170.483.720
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU	(40.376.932)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI SIAK	151.463.310
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI SIAK	(35.562.830)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI	(25.118.500)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR	(25.118.500)
Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN	109.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN	(25.118.500)
<b>Jumlah</b>		<b>(1.325.690.092)</b>



### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 5.949.503.857 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Pemprov Riau	Barang	2.851.880.818
Pemprov Riau	Barang	3.097.623.039
<b>Total Pengesahan</b>		<b>5.949.503.857</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.949.503.857</b>

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

### E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL tahun yang lalu dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TAYL adalah sebesar 0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		<b>-</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2022 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Ekuitas Akhir  
Rp399.968.975.241

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.399.968.975.241,00 dan Rp.405.511.219.187,00.

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

-



## **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : KEP-17/L.4/ Cu.1/02/2022 tentang Perubahan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/Pembuat Komitmen, pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 23 Februari 2022 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Dr. Jaja Subagja, SH.MH
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Marzawati, SH Pejabat
Penandatangan/Penguji SPM	:	Yulivia, SE.MM
Bendahara	:	Anindya Khariesna, A.Md